

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Kansil, C.S.T, dan Christine S.T. Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Lotulung, Paulus Effendie. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: IND-HILL.CO, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 11th ed. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nawawi, Handari. *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Qamar, Nurul. *Negara Hukum Atau Negara Undang-Undang*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*. Malang: Sinar Grafika, 2017.
- Santoso, Lukman. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Soejito, Irawan. *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dan Keputusan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Soemitro, Rony Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Suwanda, Dadang. *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda Yang Responsif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Suwanda, Dadang, dan Akmal Malik Piliang. *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Wasistiono, Sadu, dan Yonathan Wiyoso. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia, 2009.

2. JURNAL

Abidin, Benny, dan Ratna Herawati. "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Batang." *Law Reform* 14, no. 2 (2018): 248–61.

Aminudin. "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Katalogis* 3, no. 12 (2015): 132–41.

Budiyono. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance." *Fiat Justisia* 7, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.368>.

Djauhari, A. "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi Kolusi Nepotisme." *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 2 (2015): 173–84. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i2.1427>.

Jati, Putrie Anindya, Fifiana Wisnaeni, dan Indarja. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1–13.

Mufid, Surya Adi, Indarja, dan Untung Dwi Hananto. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–16.

Oyan, James. "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 6, no. 1 (2017): 1–23.

Putri, Rasha Anandya Laksmi, Amalia Diamantina, dan Untung Dwi Hananto. "Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Magelang Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–11.

Sinapoy, Muhammad Sabaruddin. "Pengawasan DPRD Kabupaten Konawe Utara Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Dalam Pelaksanaan Prinsip Kedaulatan Negara." *Selami IPS* 1, no. 45 (2017): 12–26.

Sirajuddin, Anis Ibrahim, Nuruddin Hady, dan Umar Sholahuddin. *DPRD: Peran Dan Fungsi Dalam Dinamika Otonomi Daerah*. Malang: SETARA Press, 2009.

Syahid, Mar. "Fungsi Pengawasan DPRD Riau: (Dilema Kepentingan Partai Politik Dan Kepentingan Publik)." *Momentum: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Keagamaan* 07, no. 2 (2019): 97–115.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara

4. WAWANCARA

Isda Ermawati W., Wawancara, Kepala Subbagian Fasilitasi Pengawasan DPRD Kabupaten Jepara, (Jepara: 11 Januari, 2021), pukul 11.00 WIB.

H. Nur Hamid, Wawancara, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jepara, (Jepara: 21 Januari, 2021), pukul 13.00 WIB.

Muhammad Ibnu Hajar, Wawancara, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Jepara, (Jepara: 21 Januari, 2021), pukul 14.00 WIB.

Nur Zuhurf, Wawancara, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, (Jepara: 7 Januari, 2021), pukul 10.30 WIB.